

# MODEL e-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA

*by* Turnitin check

---

**Submission date:** 24-Nov-2020 06:56PM (UTC+1100)

**Submission ID:** 1439344076

**File name:** 2239-Article\_Text-5398-1-10-20191001\_1.pdf (853.54K)

**Word count:** 2553

**Character count:** 17551

## MODEL e-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA

RONAL WATRIANTHOS, ADE PARLAUNGAN NASUTION, MUHAMMAD SYAIFULLAH  
Program Studi Manajemen Informatika  
AMIK Labuhan Batu

*Pembangunan e-Government sudah menjadi komitmen pemerintah sebagaimana ditetapkan pada Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Namun kebijakan pemerintah ini belum sepenuhnya berjalan di pemerintahan lokal sehingga menjadikan e-Government sebagai ujung tombak pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Resistensi terhadap perubahan adalah salah satu faktor penghambat dalam pengembangan e-Government. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi bisa dilakukan melalui e-Government Desa. Diperlukan kajian mendalam terhadap model yang cocok untuk e-Government desa ini. Proses identifikasi terhadap kebutuhan e-Government Desa dilakukan dengan analisis Critical Success Factor (CSF). Hasil analisis menghasilkan empat tahapan model yang terbagi atas dimensi kompleksitas teknologi dan organisasi dengan tingkat integrasi data dan informasi. Sedangkan hasil dari future portfolio dari perkembangan model ini menggunakan McFarlan's Analyst Grid sehingga modul strategic, high potential, support, dan key operational dapat dijabarkan.*

**Keywords : e-Government, CSF, Desa**

### PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi pada saat ini sudah berkembang pesat terutama diberbagai sektor. Peran Teknologi Informasi berdampak kepada lebih baiknya dukungan kepada akses dan pengolahan informasi terhadap layanan publik di daerah maupun pusat. Pemerintah memiliki peran dalam menghasilkan kebijakan dan tindakan pada setiap sektor dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam mendukung kinerja layanan publik (e-Government).

Untuk membangun pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan efektif, peran e-Government sangat penting untuk membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam E-Government Development Index (EGDI) yang dikeluarkan oleh PBB untuk tahun 2018, Indonesia hanya menempati ranking 107 jauh di bawah Malaysia yang berada di ranking 48 dan Singapore di ranking 7 dunia [1].

Indikator penilaian indeks ini adalah peran e-Government dalam penyebaran informasi publik,

akses atau kemudahan penggunaan informasi publik, dan kapabilitas pelayanan publik. Berkaca dari Singapura, salah satu kunci sukses implementasi e-Government adalah adanya perencanaan strategis sistem informasi yang matang. Diperlukan pondasi awal untuk penerapan Teknologi Informasi yang optimal untuk meningkatkan akselerasi pelayanan publik yang berdampak peningkatan kinerja layanan pemerintahan [2].

Pembangunan e-Government sudah menjadi komitmen pemerintah sebagaimana ditetapkan pada Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government [3]. Regulasi lainnya di tingkat nasional selain Inpres adalah Peraturan Presiden tentang pelaksanaan e-Government di instansi pemerintah pusat dan daerah [4]. Berdasarkan hasil asistensi dan bimbingan selama tahun 2017, negara bisa menghemat anggaran sampai Rp 41,15 triliun pada 5 Kementerian dan Lembaga, 7 Pemerintah Provinsi, dan 113 Pemerintah Kabupaten/Kota [5].

Namun kebijakan pemerintah ini belum sepenuhnya berjalan di pemerintahan lokal sehingga menjadikan

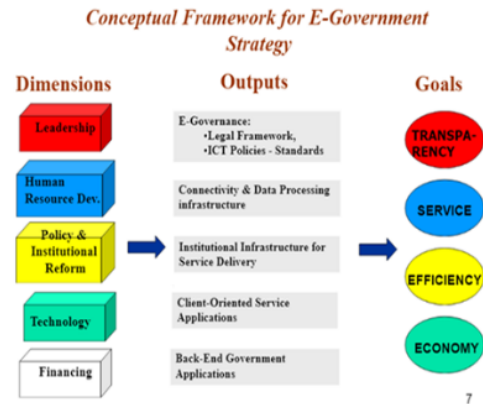
e-Government menjadi ujung tombak pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Resistensi terhadap perubahan adalah salah satu faktor penghambat dalam pengembangan e-Government selain faktor lainnya seperti ego sektoral, konteks kepentingan informasi, kurangnya keinginan saling berintegrasi, ketidakinginan saling membagi informasi, dan faktor-faktor lainnya. Padahal penerapan Teknologi Informasi akan bisa menjawab tantangan global dan bisa menarik investor dan wisatawan menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Begitu juga dengan pemerintahan desa, desa sebagai bagian tata pemerintahan paling bawah dalam susunan pemerintahan nasional mempunyai kewenangan mengatur wilayah sendiri (otonom) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia[6]. Pembangunan Desa, menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa [7]. Sehingga pembangunan desa dapat ditopang melalui konsep e-Government bagi organisasi sektor publik pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi ini menjadikan e-Government Desa bisa sebagai wahana pertanggungjawaban pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga akan tercipta pemerintahan yang mandiri, transparan dan akuntabel. E-Government dalam pemerintahan desa tidak hanya masalah website sebuah desa, tapi merupakan sistem terintegrasi oleh teknologi informasi sehingga menjadikan pemerintahan desa menjadi lebih efisien dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa.

Dukungan Teknologi Informasi dalam pemerintahan desa akan mendorong data tunggal yang selalu updatable melalui aparatur desa [8]. Atas dasar pemikiran inilah penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian terhadap pengembangan model e-Government bagi pemerintahan lokal setingkat desa sebagai pondasi dasar pelayanan publik ke tingkat pemerintahan di atasnya.

Pengembangan model e-Government pada tingkat pemerintahan lokal ini dirumuskan [9] melalui rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang diawali dengan merumuskan kerangka kerja konseptual yang terdiri dari dimensi kepemimpinan, sumber daya manusia, kebijakan reformasi institusional, teknologi, dan biaya. Luaran yang dihasilkan adalah pengelolaan Teknologi Informasi, pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi, dan aplikasi-aplikasi back end yang dapat mendukung kinerja pemerintah [10]



Gambar 1. Konsep e-Government[10]

**METODE**

**1. Identifikasi Ruang Lingkup Desa**

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi terhadap ruang lingkup desa meliputi perumusan literatur tentang desa ditinjau dari aspek hukum dan undang-undang. Perlu juga dilakukan kajian terhadap pengaturan, asas, prinsip, dan pola penyelenggaraan pelayanan publik. Observasi dilakukan dengan beberapa desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai sampling dalam penelitian ini.

Pengumpulan informasi juga dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuisioner mengenai kebutuhan perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik desa. Proses identifikasi ini mengacu kepada [7] upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa haruslah meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.

Dalam proses identifikasi ruang lingkup desa ini, perlu dipertimbangkan apakah konsep e-Government yang ditopang dengan sistem informasi dalam pembangunan desa dapat menjadi fokus utama pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan dan pemantauan pembangunan desa.

**2. Identifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi**

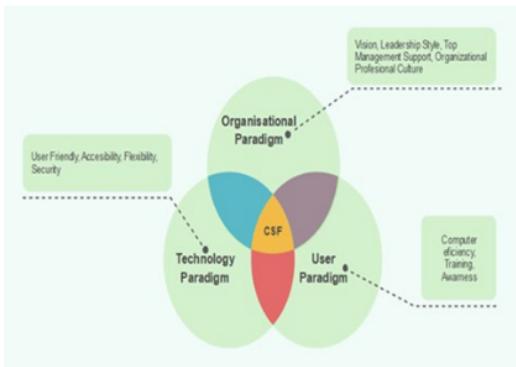
Proses ini meliputi observasi langsung ke desa untuk mengkaji pemanfaatan terkini dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang telah digunakan. Juga dilakukan pengkajian yang lebih

1 dalam terhadap perangkat yang diusulkan pada model yang akan diterapkan. Dalam proses ini, akan diteliti faktor-faktor yang menentukan keberhasilan e-Government seperti Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan, Anggaran, Pelayanan IT, dan Standar Layanan Administrasi Desa.

Proses identifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi juga harus berfokus kepada penggunaan sarana dan prasarana IT yang digunakan sebagai syarat utama terhadap layanan berbasis IT. Sarana dan prasarana ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi karena semakin canggih Teknologi Informasi yang dimiliki oleh desa akan semakin bagus juga pelayanannya.

Proses identifikasi pada tahap kedua maupun pada tahap yang pertama akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis *Critical Success Factors (CSF)*. Tujuan analisis ini adalah untuk menginterpretasikan objek secara lebih jelas dalam menentukan aktifitas apa yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan.

Di dalam CSF, terdapat tiga paradgma dalam menentukan kesuksesan pengembangan e-Government, yaitu Paradigma Organisasi (*Organizational Paradigm*), Paradihma Teknologi (*Technology Paradigm*), dan Paradigma Pengguna (*User Paradigm*) seperti yang dijelaskan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 2. Tiga Paradigma Kesuksesan e-Government

Sedangkan pengembangannya dijelaskan pada Tabel.1 berikut:

Tabel.1 Pengembangan Tiga Paradigma Kesuksesan e-Government

Faktor Organisasi	Faktor Organisasi	Faktor Pengguna
<b>Visi:</b> Pembuatan roadmap untuk mengimplementasikan inisiasi e-government 1	<b>Mudah Digunakan:</b> Sistem mudah digunakan dan tidak merumitkan pengguna 1	<b>Keberhasilan Pengguna:</b> Setiap pengguna percaya pada kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi untuk pemecahan masalah, membuat keputusan, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi 1
<b>Kepemimpinan:</b> Gaya kepemimpinan yang kuat akan membuat implementasi tim lebih aman dan transparan 1	<b>Fleksibilitas:</b> Sistem harus bisa dimodifikasi, dirubah, dan disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan 1	<b>Pelatihan:</b> Pelatihan merupakan elemen yang penting dibutuhkan Training dalam implementasi e-Government 1
<b>Dukungan Top Manajemen:</b> Dukungan dan komitmen dari senio manajemen sangat penting untuk menyediakan dan mengalokasikan sumber daya yang cukup dan untuk mempercepat proses. 1	<b>Keamanan:</b> Informasi harus aman dari akses yang tidak berhak 1	<b>Kesadaran:</b> Layanan terhadap inisiatif e-Government harus harus dipasarkan secara agresif kepada pengguna 1
<b>Kultur Organisasi:</b> kultur organisasi menjadi kunci perubahan dan transformasi menuju e-Government 1	<b>Aksesibilitas:</b> Pelayanan harus bisa diakses kepada pengguna kapan saja dan dimana saja 1	

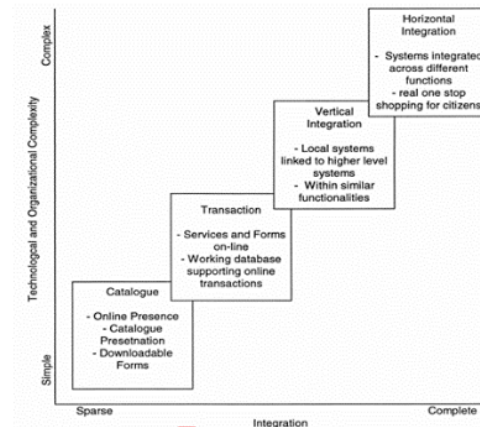
### 3. Usulan Model e-Government

Pada tahap ini usulan model e-Government akan meliputi perencanaan pengembangan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, pengembangan komunikasi, serta keamanan sistem informasinya. Termasuk di dalam tahap ini usulan pengembangan jaringan baik lokal maupun internet. Usulan model e-Government ini mengikuti tiga pola implementasi Teknologi Informasi, yaitu:

- Government to Citizen (G2C)*, yaitu pola yang melingkupi peran pemerintah dalam melayani kebutuhan publik, seperti pengurusan pajak, data kependudukan, dan layanan publik lainnya. Solusi yang dapat dikembangkan dalam pola G2C adalah integrasi data kependudukan atau akses layanan pemerintahan dengan berbagai jalur.
- Government to Government (G2G)*, yaitu pola yang melingkupi pertukaran data dan informasi secara vertikal atau horizontal antar lembaga pemerintahan. Dampaknya adalah kecepatan pengolahan data dan informasi yang lebih cepat (efektif) dan penghematan anggaran (efisiensi).
- Government to Business*, yaitu pola yang melingkupi bagaimana peran pemerintah dalam hubungannya dengan dunia bisnis.

Dalam pengusulan model e-Government Desa ini, terdapat empat model tahapan pengembangan e-Government yang dapat digunakan. Model ini terbagi atas dimensi kompleksitas teknologi dan organisasi dengan tingkat integrasi data dan informasi. Adapun tahapan pengembangan tersebut adalah:

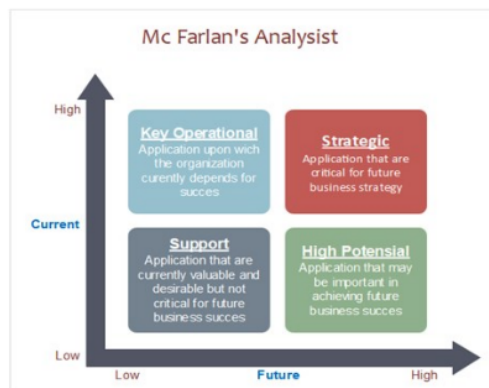
- Cataloguing*, tahapan ini fokus kepada bagaimana pemerintah mampu memberikan berbagai bentuk informasi dan menpresentasikannya ke dalam website.
- Transaction*, tahapan yang memiliki karakteristik ada sistem internal pada pemerintah yang terhubung langsung melalui antar muka (GUI) dan memberikan kesempatan masyarakat untuk mengaksesnya.
- Vertical Integration*, tahapan yang memiliki karakteristik ada hubungan antara pemerintah lokal dan pusat dalam satu fungsionalitas pelayanan administrasi pemerintah.
- Horizontal Integration*, tahapan yang memiliki karakteristik adanya integrasi pada lintas fungsi dan pelayanan



Gambar 3. Model e-Government

### 4. Pengembangan Masa Depan

Proses pengembangan masa depan (portfolio future) akan lebih ditekankan kepada pemetaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Mc Farlan Analystist yaitu: strategic, high potential, key operational, dan support.



Gambar 4. Mc Farlan's Analystist

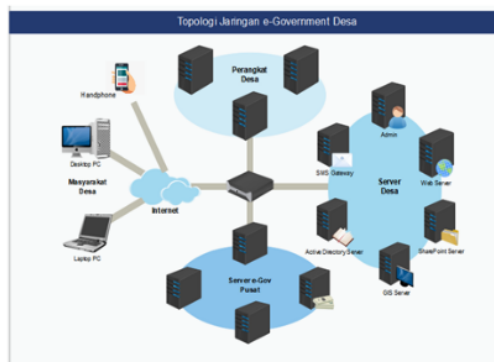
### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Analisa

Hasil analisa diperoleh dari proses identifikasi pada tahap satu metode penelitian dengan cara wawancara dan penyebaran kuisioner untuk mengidentifikasi ruang lingkup desa. Dasar yang



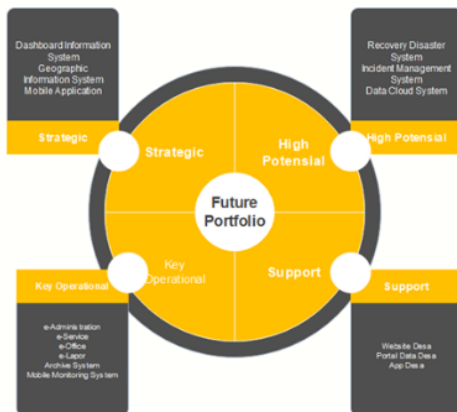




Gambar 6. Usulan topologi e-Government Desa

### 3. Pengembangan Masa Depan (Future Portfolio)

Setelah didapat identifikasi pada ruang lingkup desa, melakukan kajian terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan, dan kemudian memetakannya ke dalam usulan model e-Government, maka diperoleh *future portfolio* sesuai dengan *McFarlan's Analyst Grid* seperti pada tabel berikut:



Gambar 7. Future Portfolio e-Government Desa

### 4. Tantangan e-Government

Di dalam penelitian ini, analisa menunjukkan e-Government sebenarnya memberikan peluang yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ada beberapa tantangan dalam e-Government ini yang harus dipertimbangkan, seperti:

#### a. Technical issue.

Diperlukan analisis yang mendalam terhadap

pemilihan perangkat terkait dengan besarnya investasi yang dikeluarkan harus sejalan dengan manfaat yang diperoleh. Pemilihan teknikal ini harus tepat dengan memperhatikan aspek interoperabilitas, privasi, keamanan, dan interaksi dengan pihak terkait.

#### b. Economical Issue

Pembangunan sebuah e-Government harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Biaya ini akan terkait dengan dana yang berasal dari pajak masyarakat. Aspek ini akan meliputi biaya, kemampuan pemeliharaan, penggunaan ulang, dan portabilitas.

#### c. Social Issue

Isu ini terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap e-Government ini seperti pada aspek kemampuan akses, kemampuan penggunaan, dan penerimaan terhadap sistem yang baru.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Setelah analisis dan hasil didapatkan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Diperlukan SDM yang terlatih terutama dari perangkat desa menggunakan Teknologi Informasi dalam perencanaan model e-Government Desa ini.
- Tahapan identifikasi ruang lingkup desa merupakan tahapan penting dalam mengukur kesiapan desa menggunakan model e-Government ini.
- Future portfolio yang dipetakan ke dalam *McFarlan's Analyst* menjadi usulan model e-Government dalam penelitian ini.
- Perancangan dashboard information system menjadi elemen yang paling strategis karena akan membantu perangkat desa dalam mengambil keputusan dan mengkaji historis data desa.
- Media komunikasi berbasis mobile application layak dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi e-Government.

### 2. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah:

- Diperlukan kajian *feasibility* lebih lanjut untuk menguji kelayakan pengembangan Teknologi Informasi dalam usulan model e-Government yang telah dihasilkan.
- Perlu dirancang mekanisme sistem audit untuk memastikan model ini berjalan sesuai yang diharapkan oleh semua *stakeholders*.
- Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap dampak kematangan model e-Government ini

terutama dalam penggunaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Economic and Social Affairs, "United Nations e-Government Survey 2018," New York, 2018.
- [2] S. Perdana and Y. E. Putra, "Model E-Government Pada Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kelurahan," *J. Politek. Caltex Riau*, vol. 2, no. 1, pp. 7–16, 2016.
- [3] P. Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. Indonesia, 2003, pp. 53–65.
- [4] P. Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," Indonesia, pp. 1–110, 2018.
- [5] I. D. GUCI, "Kata Menteri PANRB Soal Perpres E-Government," *PORTALSATU*, 2018. [Online]. Available: <http://portalsatu.com/read/news/kata-menteri-panrb-soal-perpres-e-government-39894>. [Accessed: 05-Dec-2018].
- [6] Y. Yudhanto, "E-government untuk Desa," *Rumah Studio*, 2016. [Online]. Available: <http://rumahstudio.com/2016/10/29/e-government-untuk-desa/>. [Accessed: 05-Dec-2018].
- [7] P. Republik Indonesia, *UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*, no. 1. 2014, p. 103.
- [8] Yuniadi Mayowan, "PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI DESA (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)," *PROFIT J. Bus. Adm. FIA UB*, vol. 10, no. 1, 2016.
- [9] D. Bhatia, "Designing and Implementing e-Government Strategy," 2012.
- [10] V. Kumar, B. Mukerji, I. Butt, and A. Persaud, "Factors for Successful e-Government Adoption: a Conceptual Framework," *Electron. J. e-Government Vol.*, 2007.
- [11] R. Watrionthos and M. Nasution, "Analisa Kemampuan Transfer Data VPN Berbasis Open Source Pada Kondisi Enkripsi-Denkripsi dan Kompresi-Dekompresi," *Inform. AMIK Labuhan Batu*, vol. Vol.6 No.1, no. 1, 2018.





# MODEL e-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**95%**

SIMILARITY INDEX

**95%**

INTERNET SOURCES

**9%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1**

**search.unikom.ac.id**

Internet Source

**93%**

**2**

**text-id.123dok.com**

Internet Source

**2%**

**3**

**etd.unsyiah.ac.id**

Internet Source

**1%**

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off